

BAB IV KESIMPULAN

Permasalahan pekerja anak menjadi momok di berbagai belahan dunia, dengan benua Afrika terutama di wilayah Sub-Sahara sebagai pemegang angka tertinggi. Salah satu sektor pekerja anak yang paling marak terjadi di Afrika berada di bidang agrikultur, seperti yang terjadi di Nigeria yang pada kurun waktu 2016-2017 dipengaruhi oleh krisis minyak bumi yang mempengaruhi negara-negara dengan perekonomian yang bergantung pada ekspor minyak bumi. Ada banyak faktor yang mendorong maraknya praktik pekerja anak, di antaranya latar belakang keluarga yang miskin, buta huruf, poligami, meninggalnya anggota keluarga, persepsi petani dan hal ini semakin didukung dengan kurangnya regulasi di bidang agrikultur. Dalam melakukan penelitian ini, digunakan konsep *human security* dimana penulis menemukan bahwa isu pekerja anak yang terjadi di Nigeria pada tahun 2016-2017 ini merupakan bentuk pelanggaran dalam dimensi *personal security* dengan faktor ekonomi sebagai penyebab utamanya.

Dengan melihat prinsip-prinsip *human security* dan mempertimbangkan berbagai faktor yang menjadi latar belakang permasalahan, penulis menemukan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh UNICEF cenderung berfokus pada penyediaan pendidikan layak dan bantuan dana, seperti program GEP-CTP, *UNICEF Country Program*, dan *Education in Emergencies*. Sementara untuk perlindungan hukumnya lebih didukung oleh pemerintah dan ILO-IPEC dalam mengusahakan perlindungan hukum bagi anak-anak, yang dapat dilihat dari adanya ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 tentang usia minimum anak untuk bekerja, Konvensi ILO nomor 182 tentang bentuk pekerjaan anak terburuk, membuat peraturan berupa *National Policy on Child Labor*, membentuk NAPTIP, mengesahkan CRA bagian 28 dan 29 menjadi undang-undang yang melarang tindakan eksploitatif terhadap pekerja anak, dan menerapkan beberapa program sosial seperti *Decent Work Country Program II*, *National Security Protection Program*, dan menerapkan WACAP.

Meski begitu, selama kurun waktu satu tahun tidak banyak perubahan signifikan terkait perlindungan anak dari isu pekerja anak ini yang penulis temukan, meskipun dari berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya. Dalam meneliti isu ini, penulis juga menemukan bahwa pihak yang terlibat, terutama pemilik perkebunan atau petani senior cenderung bersikap kurang transparan dalam menyediakan data terkait jumlah anak-anak

yang bekerja di bidang agrikultur dengan alasan sosiokultural, sehingga hal ini cukup mempersulit dalam proses mengetahui seberapa parah isu ini terjadi karena adanya bias dalam pendapat responden dalam penelitian-penelitian yang dirujuk oleh penulis. Pada akhirnya, dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan yang lebih besar antara pemerintah, organisasi internasional dan regional dan masyarakat sipil untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam memberantas isu ini.

